

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatNya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini sudah melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan di sana sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Akhirnya, semoga memberikan manfaat.

Marabahan, November 2018

Camat Rantau Badauh,

JULIANNOR FATAHILLAH, SSTP
NIP 198407052002121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	2
	D. Sistematika Penulisan	2
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	5
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD	5
	B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	32
	C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	34
	D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
	E. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan	
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
	B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	
	C. Program dan Kegiatan	
BAB IV	INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD	
	A. Indikator Kinerja	
	B. Kelompok Sasaran	
BAB V	PENUTUP	
	A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	
	B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	
	C. Rencana Tindak Lanjut	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 (Rancangan Awal) Kabupaten Barito Kuala

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rantau Badauh

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Permendagri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 sejalan dengan kebijakan pemerintah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala adalah :

- A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- C. Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- D. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- E. Permendagri RI No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2017 tentang Struktur Jabatan Kecamatan Rantau Badauh Barito Kuala

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Barito Kuala, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan rantau badauh Kabupaten Barito Kuala, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

A. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

B. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan rantau badauh Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kecamatan rantau badauh Kabupaten Barito Kuala.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan rantau badauh

Kabupaten Barito Kuala, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1).

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito

Kuala Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

B. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.

C. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA

A. Indikator Kinerja

Menjelaskan Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program.

Indikator kinerja kegiatan yg memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

B. Kelompok Sasaran

Menjelaskan Memuat penjelasan terhadap karakteristik dan kelompok sasaran.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Kecamatan Rantau Badauh telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2018, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2017 – 2022 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja dan realisasi renstra SKPD Tahun 2018 Kecamatan Rantau Badauh yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan :

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2 = 2019-2 = 2018) berdasarkan target indikator kinerja program (80%) tahun 2018 hingga bulan November 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang direncanakan:
 - 1) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (79,50 %)
 - 2) Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur (66,67 %)
 - 3) Program peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan (75%)

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target keluaran yang direncanakan:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran (83,92 %)
- 2) Program peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan (91,67%)
- 3) Program peningkatan peran serta kepemudaan (100%)
- 4) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi (100%)
- 5) Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama (100%)
- 6) Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa (88,89%)
- 7) Program perencanaan pembangunan daerah (100%)

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

Kode	Uraian / bidang Urusan Pemerintahan daerah dan program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (akhir Tahun Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD November tahun 2018			Target Program /kegiatan 2019	Rencana Realisasi program / kegiatan Renstra SKPD Tahun 2019		Catatan Sumber Dana
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 26 01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Presentase Capaian Adminstrasi perkantoran									APBD

1	26	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim & jumlah materai yang tersedia(lembar) dan jasa administrasi kantor	2492	0	340 Surat	340 Surat	100	340 Surat	680 Surat	27,29	APBD
1	26	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan langganan listrik dan air yang dibayarkan (bulan)	60 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	40	APBD
1	26	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua, tiga dan empat yang membayar pajak tahunan	50 Unit	0	9 Unit	9 Unit	100	9 Unit	18 Unit	36	APBD
1	26	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tersedianya alat-alat kebersihan dan jasa kebersihan kantor	1355	0	270	270	100	270	540	39,85	APBD
1	26	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Ketersediaan alat tulis kantor	120 jenis	0	24 jenis	24 jenis	100	24 jenis	48 jenis	40	APBD
1	26	01	11	Penyediaan barang cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi kantor	75000	0	15000	14500	96,67	15000	29500	39,33	APBD

1	26	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah alat listrik tersedia	10 Buah	0	2 Buah	2 Buah	100	2 Buah	4 Buah	40	APBD
1	26	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan PERUU	1101 Eksemplar	0	365 Eksemplar	293 Eksemplar	80,27	365 Eksemplar	658 Eksemplar	59,76	APBD
1	26	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum pegawai, rapat dan jamuan tamu	24405 Porsi	0	4881 Porsi	4120 Porsi	84,41	4881 Porsi	9001 Porsi	36,88	APBD
1	26	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	143 Laporan	0	29 Laporan	22 laporan	75,86	27 Laporan	49 Laporan	34,27	APBD
1	26	01	20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1980 Laporan	0	396 Laporan	255 laporan	64,39	396 Laporn	651 Laporn	32,88	APBD
1	26	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<i>Persentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)</i>									APBD
1	26	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas aparatur	2 Unit	0	-	-	0	-	-	0	APBD

1	26	02	06	Pengadaan perlengkapan rumah dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas	3 Unit	0	-	-	0	-	0	0	APBD
1	26	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	11 Buah	0	2 Buah	2 Buah	100	3 Buah	5 Buah	45,45	APBD
1	26	02	08	Pengadaan peralatan rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah dinas	5 Buah	0	-	-	0	-	-	0	APBD
1	26	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100	-	-	0	APBD
1	26	02	10	Pengadaan meubeler	Jumlah pengadaan meubeler	4 Buah	0	2 Buah	2 Buah	100	1 Buah	3 Buah	75	APBD
1	26	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	0 Kali	0	-	-	0	-	-	0	APBD
1	26	02	22	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (400 m) dan jumlah hari terjamin keamanan gedung kantor	3825	0	766	766	100	766	1532	40,05	APBD
1	26	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50 Unit	0	9 Unit	7 Unit	77,78	9 Unit	16 Unit	32	APBD
1	26	02	26	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	-	0	-	-	0	-	-	0	APBD
1	26	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	56 Unit	0	15 Unit	13 Unit	86,67	9 Unit	22 Unit	39,29	APBD

1	26	04		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (%)										APBD
1	26	04	01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang terbeli	1 stel	0	-	-	0	1 stel	1 stel	100		APBD
1	26	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR (%)										APBD
1	26	05	03	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur mengikuti Bimtek	19 Ok	0	3 Ok	3 Ok	100	3 Ok	6 Ok	31,58		APBD
1	26	15		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase kasus gangguan keamanan yang ditangani (%)										APBD
1	26	15	08	Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	60 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	40		APBD
1	26	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase Jumlah pelaksanaan pameran promosi investasi di kabupaten (%)										APBD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Rantau Badauh

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Rantau Badauh dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Renstra Kecamatan Rantau Badauh tahun 2017-2022.

Sebelumnya akan dijelaskan untuk Sasaran Renstra Kantor Camat Rantau Badauh dalam menentukan IKU kantor kecamatan Rantau Badauh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa

Berdasarkan Sasaran Renstra di atas, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik

Sebelum melaksanakan pengukuran dan perhitungan IKU, maka IKU tersebut akan dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran. :

Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi / Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan	Teknik Monitoring dan
----	-------------------	------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------

				Data	Evaluasi
1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat IKM (%)	Kuantitatif	Jumlah masyarakat Yang puas : jumlah Masyarakat yang Menjadi sampel Responden x 100 % Jumlah masyarakat Yang dilayani	Data bersumber dari Program & Kegiatan dari IKU Esselon IV Yang Telah Mendukung IKU Esselon III Yang disajikan Berdasarkan data	Monitoring dan evaluasi data Capaian Dilakukan secara berkala melalui rapat Koordinasi terbatas yang dipimpin oleh
2	Presentase desa Dengan administrasi desa yang Baik	Kuantitatif	Jumlah desa dengan Administrasi desa Yang baik / jumlah Desa x 100%	Dilapangan dan Realisasi Capaian fisik yang Dilaporkan secara berkala Data bersumber dari Program & Kegiatan dari IKU Esselon IV Yang Telah Mendukung IKU Esselon III Yang disajikan Berdasarkan data Dilapangan dan Realisasi Capaian fisik yang Dilaporkan secara berkala	Camat Dengan Melibatkan seluruh pejabat Esselon IV Monitoring dan evaluasi data Capaian Dilakukan secara berkala melalui rapat Koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Camat Dengan Melibatkan seluruh pejabat Esselon IV

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kantor Camat Rantau Badauh Hingga November 2018 dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Capaian		Tahun 2020	Tahun 2021	
						Tahun 2018	Tahun 2019			
										Realisasi

1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat IKM (%)	82,50	82,75	83	83,25	82,55	83	83,25	84	2019 dan proyeksi 2020-2021 memakai angka target
2	Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	75	80	85	90	76,19	85	90	95	Realisasi 2019 proyeksi 2020-2021 memakai angka target

Dari hasil proses capaian IKU tersebut, dapat dianalisa bahwa untuk penilaian sementara hingga November 2018 untuk Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,33 % dengan kalkulasi target sebesar 80 % pada renstra kecamatan, dengan demikian kegiatan ini telah terlaksana sebesar 104.16% atau melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan responden sementara. Hasil ini kemungkinan bisa berubah pada akhir periode perhitungan (Desember 2018) tergantung dari hasil akhir perhitungan indeks kepuasan masyarakat.

Selanjutnya untuk Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik untuk penilaian sementara hingga November 2018 adalah sebesar 72 % dengan kalkulasi Target 80 % pada renstra kecamatan, pengukuran ini diukur dari jumlah desa yang memiliki system administrasi yang baik yaitu dalam pelaksanaan Dana Desa dan ADD di 9 (sembilan) desa di Kecamatan Rantau Badauh, sementara ini hingga November hanya 5 Desa yang telah menyusun

dana desa dan DD sesuai ketentuan yang berlaku dan diusahakan akan terwujud hingga bisa melampaui target.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan berdasarkan indikator pendukung dari Indikator Kinerja Esselon IV. Adapun untuk IKU Esselon IV guna mendukung pencapaian IKU esselon III adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja IKU Esselon IV
Kantor Camat Rantau Badauh Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target Th. 2018 (%)	Capaian Kinerja (%)
	SASARAN RPJM	SASARAN RENSTRA			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
a.	(Sasaran 4). Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP Persentase Kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan gender Persentase jumlah penegakkan perda yang dilaksanakan Persentase lembaga ekonomi desa yang di bina	80 80 100 80 80	78 75

			Persentase organisasi kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina		50
					100
					75
		Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa	Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar	80	100
			Persentase desa yang menyusun APBdes dengan benar dan tepat waktu	80	85

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

Permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rantau Badauh perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2020 adalah :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- c. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
- d. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- g. Keberadaan pusat pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Adapun Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain begitu pula dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik kecamatan hanya merencanakan sedangkan yang melaksanakan SKPD lain. Jadi kecamatan hanya melaksanakan pelayanan administrasi/kegiatan administrasi.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Rantau Badauh permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan

merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah kurangnya pembinaan terhadap pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat termasuk di dalamnya pembinaan aparatur, kelembagaan dan pembinaan administrasi sebagai pendukung kegiatan.

Berbagai permasalahan dan hambatan di atas, otomatis memiliki dampak yang cukup signifikan untuk kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala secara menyeluruh, selain keterlambatan akses mobilitas data penunjang pembangunan, dampak yang dapat dirasakan adalah keterbatasan informasi pembangunan daerah, serta realisasi program kerja pemerintah daerah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Selain itu, untuk menghadapi permasalahan dan hambatan di atas, Kantor Camat Rantau Badauh memiliki tantangan untuk dapat mensukseskan program perencanaan pembangunan pemerintah daerah antara lain yaitu dengan :

- a. Kecamatan Rantau Badauh dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada pelayanan di kantor Kecamatan Rantau badauh.
- b. Aparatur Kecamatan Rantau Badauh dituntut untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
- c. Lebih Intensif untuk menyatukan persepsi antara Aparatur pemerintah dan masyarakat guna tersalurnya aspirasi serta tercapainya pembangunan secara menyeluruh.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah provinsi dan kabupaten kota dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Arah kebijaksanaan pembangunan daerah kabupaten harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

SKPD Kecamatan berdasarkan telaahan renstra KL lembaga mengacu pada rencana strategis kementerian dalam negeri sedangkan SKPD Kecamatan mengacu pada rencana strategis Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya penjabaran program dan kegiatan yang menyangkut pelayanan kecamatan rantau badauh dituangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rantau Badauh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan Rantau Badauh.

Dengan hal tersebut, maka kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala merumuskan program dan kegiatan yang terdapat dalam renja setiap tahunnya dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1 Penguatan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kelembagaan.	- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran
			1.2 Penguatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tupoksi	- Mengikuti Penyelenggaraan training berupa diklat, bimtek dan pelatihan
			1.3 Penguatan pelayanan kepada masyarakat	- Survey IKM - Monitoring pelayanan SKPD
			1.4 Peningkatan pemberdayaan Masyarakat	- Monitoring dan pembinaan lembaga ekonomi desa - Pembinaan organisasi kemasyarakatan
			1.5 Penguatan Peraturan Daerah	- Sosialisasi dan monitoring penegakan perda
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	2.1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Desa	- Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa - Monitoring, evaluasi rancangan peraturan desa (APBDes) dan pengendalian pelaksanaan APBdes - Monitoring, evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa - Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

3.3 Program dan Kegiatan

Mengacu pada visi misi Bupati Barito Kuala Periode 2017-2022, serta Program Prioritas Daerah, Provinsi dan Nasional, maka dalam rangka mencapai semua target sasaran di atas Kecamatan Rantau Badauh menyusun 13 Program dan 30 Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Pengadaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan
 - Pengadaan peralatan rumah dinas/jabatan
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- e. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
- f. Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
- g. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan kegiatan:

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- h. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan :
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
 - Monitoring, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
 - Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di Pemerintahan Desa
- i. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
 - MTQ Tingkat Kabupaten
- j. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- k. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
 - Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
- m. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - Pembinaan wawasan kebangsaan
- o. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - Survei indeks kepuasan masyarakat

TABEL C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN RANTAU BADAUH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BARITO KUALA**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3		5	6	7	8	9	10
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				119,734,400				183,683,000
0	0	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Rantau badauh	340 lembar	1,500,000	APBD		380 lembar	1,800,000
0	0	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan langganan telepon, listrik, internet dan air yang dibayarkan	Rantau badauh	36 bulan	13,860,000	APBD		36 bulan	19,520,000
0	0	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya		5 unit	2,000,900	APBD		6 unit	4,250,000

0	0	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar	Rantau badauh	1 Orang	10,201,500	APBD		1 orang	13,500,000
0	0	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Rantau badauh	31 Jenis	9,226,500	APBD		34 jenis	9,000,000
0	0	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan	Rantau badauh	4 jenis	6,443,500	APBD		5 jenis	7,500,000
0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah perlengkapan instalasi listrik	Rantau badauh	5 jenis	785,000	APBD		6 jenis	1,345,000
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan koran	Rantau badauh	730 eksemplar	2,280,000	APBD		730 eksemplar	3,000,000
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan minuman	Rantau badauh	4270 porsi	20,517,000	APBD		5206 porsi	27,108,000
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi	Rantau badauh	26 laporan	37,280,000	APBD		38 laporan	80,300,000
0	0	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi	Rantau badauh	375 laporan	15,640,000	APBD		409 laporan	16,360,000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				31,435,000				90,500,000
0	0	2	5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/sepeda motor	Rantau badauh	1 unit	0	APBD		1 unit	25,000,000

0	0	2	6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas	jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	rantau badauh	2 unit	0	APBD		2 Unit	6,000,000
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rantau badauh	2 buah	0	APBD		2 buah	5,750,000
0	0	2	8	pengadaan peralatan rumah jabatan	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	rantau badauh	2 buah	0	APBD		1 buah	5,000,000
0	0	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Rantau badauh	4 buah	0	APBD		1 buah	8,000,000
0	0	2	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara dan kondisi baik	rantau badauh	1 unit	0	APBD		1 unit	5,000,000
0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional	Rantau badauh	1 unit	12,925,000	APBD		1 unit	15,500,000
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Rantau badauh	5 unit	16,790,000	APBD		8 unit	19,000,000
0	0	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Rantau badauh	2buah	300,000	APBD		3 buah	450,000
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Rantau badauh	5 buah	1,420,000	APBD		4 buah	800,000

0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				18,500,000				74,000,000
0	0	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Rantau badauh	2 orang	18,500,000	APBD		4 orang	74,000,000
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0				1,100,000
0	0	6		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Rantau badauh	2 laporan	0	APBD		2 laporan	600,000
0	0	6		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Rantau badauh	1 laporan	0	APBD		1 laporan	500,000
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				1,280,000				15,000,000
1	6	16	7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PKMS	Jumlah PMKS bermasalah yang di fasilitasi	Rantau badauh	327 KK	1,280,000	APBD		327 KK	15,000,000
1	5	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				17,595,000				36,375,000
1	5	15	8	Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	jumlah perda yang di tegakkan	Rantau badauh	2 perda	17,595,000	APBD		2 perda	36,375,000

3	38	25		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama				25,776,000				34,000,000
3	38	25	1	MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	Rantau badauh	30 Orang	25,776,000	APBD		30 Orang	34,000,000
3	38	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan				2,116,000				9,000,000
3	38	17		peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Rantau badauh	1 Kegiatan	2,116,000	APBD		4 kegiatan	9,000,000
3	39	33		Program Peningkatan Pelayanan Publik				2,320,000				13,828,000
3	39	33		Survei Indeks Kepuasan masyarakat	Jumlah rapat penyusunan SOP		370 responden	500,000	APBD		370 responden	2,800,000
3	39	33		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah sosialisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan		1 Kali	1,820,000	APBD		8 kali	11,028,000
3	34	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				6,513,000				23,784,000
3	34	19		Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	Jumlah rapat koordinasi pendapatan desa		2 Kali	1,024,000	APBD		3 Kali	4,500,000
3	34	19		Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di kelurahan dan pemerintahan desa	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi		8 Desa	0	APBD		8 Desa	5,480,000

3	34	19	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat	8 dokumen	945,000	APBD		8 dokumen	5,800,000
3	34	19	4	Monitoring, Evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi	8 Desa	4,544,000	APBD		8 Desa	8,004,000
3	33	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			5,490,000				8,610,000
3	33	21	9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	8 deas	5,490,000	APBD		8 desa	8,610,000
4	8	18		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			15,000,000				23,000,000
4	8	18	3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu-ibu yang mengikuti penyuluhan	280 orang	15,000,000	APBD		350 orang	23,000,000
				Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah			2,600,000				5,000,000
		15	12	Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah (CHT)	Jumlah Pameran pembangunan yang di ikuti	1 kali	2,600,000	APBD		1 kali	5,000,000
4	19	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan			10,350,000				31,445,000

4	19	16	6	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah peserta atak diang yang mengikuti lomba	2 Orang	0	APBD		2 Orang	4,000,000
4	19	16	11	Pelaksanaan pelatihan paskibraka dan upacara 17 agustus	Jumlah anggota paskibra yang dilatih	10 Orang	10,350,000	APBD		16 Orang	22,495,000
4	19	16	12	Kemah bakti karang taruna	Jumlah peserta kemah bakti karang taruna yang dikirim	15 orang	0	APBD		15 orang	4,950,000
		3		Program peningkatan disiplin aparatur			0				2,500,000
		3	5	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu	1 pasang	0	APBD		2 Pasang	2,500,000
							258,709,400				551,825,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing- masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan rantau badauh tahun 2020 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Renja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Rantau badauh. Pada tahun 2020 program yang telah direncanakan pada kecamatan Rantau Badauh yakni berjumlah 13 Program dan 30 kegiatan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN RANTAU BADAUH**

Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 25 Sei Gampa ☎ (0511) 7479580 Rantau Badauh ✉ 70561

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

CAMAT RANTAU BADAUH,

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam tahap persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan Keputusan Camat Rantau badauh
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018;

17. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
18. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/271/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Rantau badauh Tahun 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
- a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan RENJA Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala 2020;
 - b. Menyusun Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA dan Rancangan Akhir RENJA Kantor Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan komponen RENSTRA Kecamatan Rantau Badauh dan RKPD Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Menetapkan target indikator kinerja program tahun 2020 dan,
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Rantau Badauh
Pada tanggal 10 Desember 2018**

CAMAT RANTAU BADAUH

**JULIANNOR FATAHILLAH, SSTP
NIP. 19840705 200212 1 001**

Lampiran : Keputusan Camat Rantau
Badauh Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 22 /RB/2018
Tanggal : 10 Desember 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANWAL RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN RANTAU BADAUH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020**

JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
Penanggung jawab	: Camat Rantau badauh
Ketua	: Sekretaris Camat
Sekretaris	: Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Aset
Anggota	: 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasi Pemerintahan 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Kasi Kesra dan Pelayanan 5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 6. Bendahara Pengeluaran

CAMAT RANTAU BADAUH

**JULIANNOR FATAHILLAH, SSTP
NIP. 19840705 200212 1 001**

